

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Pengaruh Pemberian Reward Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara
(Adrian Tawai)

Analisis Koordinasi Dan Iklim Kerja Dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
(Ani Heryani)

Karakteristik Struktur Organisasi Dan Perilaku Kerja Pegawai Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)
(Jamal)

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
(Malik)

Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Listrik Pedesaan Masyarakat Kabupaten Mesuji
(Refly Setiawan)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Kota Kendari
(Rola Pola Anto)

Kapabilitas Sumberdaya Manusia Pada Organisasi Publik Pemberi Layanan Dasar Di Kabupaten Waykanan
(Yadi Lustiadi)



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 3 Desember 2017

Pembina

Dr.Ir. M. Yusuf S.Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr.Yadi Lustiadi,M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik,M.Si

Penyunting Ahli

Prof.Dr. Yulianto,M.Si(FISIP-UNILA)

Dr.Akhmad Suharyo,M.Si (FISIP-UBL)

Dr.Nur Efendi,M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal,M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Vida Yunia Cancer, S.A.N

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu- Bandar Lampung 35142

Telp:(0721) 789825, Fax:(0721) 770261,E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 3 DESEMBER 2017

DAFTAR ISI

Pengaruh Pemberian Reward Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara	1-23
Adrian Tawai	
Analisis Koordinasi Dan Iklim Kerja Dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	24-38
Ani Heryani	
Karakteristik Struktur Organisasi Dan Perilaku Kerja Pegawai Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)	39-65
Jamal	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan	66-81
Malik	
Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Listrik Pedesaan Masyarakat Kabupaten Mesuji	82-92
Refly Setiawan	
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Kota Kendari	93-105
Rola Pola Anto	
Kapabilitas Sumberdaya Manusia Pada Organisasi Publik Pemberi Layanan Dasar Di Kabupaten Waykanan	106-116
Yadi Lustiadi	

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) DALAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh :

**Dr. MALIK, M.Si, DOSEN PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIPOL
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

This Research aim to picture, analysing and theoretical view of Implementation of policy of gift of fund Aid of Education Operational in make-up of quality of education of elementary school in Subdistrict Wave The Regency of Lampung Selatan, and also factors supporting and pursuing implementation of policy of gift of fund Aid of Education Operational in make-up of quality of education of elementary school in Subdistrict Wave The Regency of Lampung Selatan.

This Research use the descriptive method. this Method use is to mendeskripsikan of implementation of policy of gift of relief fund of Education Operational Elementary At School Subdistrict Wave The Regency of Lampung Selatan, studying qualitative, how All data obtained is direct the than field informan by using interview and obsevasi, is and also supported by document.

Result of research indicate that the Implementation of policy of gift of relief fund of Education Operational in make-up of quality of education of Elementary School in Subdistrict Wave The Regency of Lampung Selatan, have been executed and have walked, during three the last year, but its execution not yet optimal.

Keywords: policy implementation, aid of education operational

1. Pendahuluan

Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 1996 telah menerapkan pembebasan biaya pendidikan pada level pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Ke depan upaya tersebut berlanjut hingga tuntas menuju pengembangan pendidikan 12 tahun. Kebijakan tersebut,

sejalan dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal

kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, prasarana, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran, antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, peralatan alat tulis dan biaya pribadi lainnya.

Kebijakan pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dimaksudkan agar semua warga masyarakat Lampung pada usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat menempuh pendidikan yang bermutu dan bebas dari biaya operasional pendidikan. Kemudian Peraturan Gubernur Lampung No. 24 Tahun 2008 tentang pembebasan biaya operasional pendidikan, bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk tidak menempuh pendidikan hanya karena alasan ekonomi orang tua yang lemah/tidak mampu. Pembebasan biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud, juga ditujukan untuk

memberikan kepastian kepada masyarakat dalam hal ini orang tua/wali guru, atas biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal berdasarkan standar nasional pendidikan.

Secara empirik, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2007-2012, diperoleh beberapa permasalahan terkait dengan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, antara lain: (1) Layanan pendidikan formal bagi masyarakat belum optimal; (2) Belum optimalnya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan non formal; (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah yakni 31,89%; (4) APK SMA/MA/SMK baru 43,15%, APM baru 34,65%; (5) Lebih dari 15% masukan SD/MI tidak melalui TK/RA; (6) Masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas; (7) Ada 45% sekolah kekurangan buku pelajaran; (8) Sekitar 16% sekolah memiliki rata-rata nilai ujian kurang dari 6; (9) Ada 8,08% sekolah memiliki jumlah guru kurang dari 60 guru; (10) Rasio guru/buku kurang dari 1:1; (11) Masih banyak tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4, bahkan banyak sekolah yang masih menggunakan jasa guru honorer; (12) Belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM); (13) Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama

perpustakaan dan laboratorium serta fasilitas pendukung masih kurang; (14) Distribusi guru sekolah khususnya di pelosok/pedesaan belum memadai; (15) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih relatif kurang; (Sumber: Renstras Diknas Kab. Lampung Selatan, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang: “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan”.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan?
2. Aspek-aspek apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Hamidi (2004:14) berangkat dari penggalan data berupa pandangan responden, yang kemudian responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Aziz dalam Bungin (2003:53) terdapat pola tertentu yang penuh dengan variasi, informasi yang didapatkan harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.

3. Pembahasan

1. Prosedur/Cara Memperoleh Insentif

Prosedur yang harus ditempuh serta persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh insentif diuraikan oleh Kepala Sekolah selaku informan dalam penelitian ini, maka berikutnya calon penerima insentif tersebut diharuskan mengisi formulir atau ditentukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan menghadap ke kepala sekolah (untuk guru SD). Berdasarkan keterangan sejumlah informan bahwa untuk

menarik dana BOP dari Bank yang ditunjuk (BPD atau BRI) sebelumnya harus dibuatkan rekomendasi yang dibuat oleh Ketua Tim Pengelola BOP Kabupaten Lampung Selatan yang diberikan kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk menarik/mengambil BOP/insentif guru setiap triwulan sebanyak guru yang menerima dana tersebut. Kemudian di sekolah masing-masing dibuatkan daftar penerima oleh pembuat daftar/Kepala sekolah.

2. Cara pengambilan insentif

Berkaitan dengan cara mengambil insentif, semua informan menunjukkan adanya kesamaan dalam pengambilan dana insentif, yaitu untuk ketiga tingkat pendidikan kesemuanya mengambil insentif secara kolektif oleh komite sekolah. Alasan yang diajukan oleh guru penerima insentif atas kondisi tersebut, sebagaimana terungkap dalam wawancara adalah bahwa mereka selama ini tidak pernah diperintahkan oleh sekolah untuk mengambil langsung uang insentifnya di bank. Disamping itu, mereka juga menyatakan ketidaktahuannya bahwa uang insentif tersebut dapat diambil sendiri oleh penerima insentif, walaupun mengetahui bahwa insentif tersebut dapat diambil sendiri, mereka menyatakan lebih praktis mengambilnya melalui komite sekolah.

3. Jumlah insentif yang diterima dan penggunaan insentif

Sebagaimana tertangkap dari wawancara, dalam pertanyaan menyangkut jumlah insentif yang diterima, semua informan menyatakan tetap utuh karena yang mengambil uang insentif adalah guru atau penerima BOP di sekolah masing-masing sekolah, para informan menyatakan bahwa mereka tidak menerima insentif secara utuh karena dipotong pajak penghasilan (PPH 21). Adapun jumlah masing-masing yang diterima setiap sekolah cukup bervariasi karena disesuaikan dengan jumlah murid, demikian juga besaran insentif yang diterima masing-masing guru jumlahnya bervariasi masing-masing sekolah tidak sama karena berdasarkan jumlah murid yang ada dalam sekolah tersebut.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa tidak utuhnya jumlah insentif yang diterima oleh para guru disebabkan oleh adanya potongan oleh pihak sekolah atas insentif tersebut untuk kepentingan membayar pajak penghasilan. Keadaan ini sekaligus menggambarkan bahwa penerima insentif benar-benar menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang mempunyai penghasilan pada batas-batas tertentu.

Dengan demikian pada satu sisi pengalokasian dana insentif sesuai petunjuk teknis, yaitu

insentif ditujukan dan diterima oleh guru baik PNS maupun honorer berdasarkan kesepakatan secara internal sekolah. Di sisi lain, walaupun terjadi pemotongan insentif secara langsung untuk berbagai kepentingan sekolah guru yang bersangkutan, tidak sesuai atau menyimpang dari petunjuk teknis pengalokasian dana insentif. Jadi dalam implementasinya insentif yang diterima para guru sebetulnya tetap utuh setelah dipotong pajak penghasilan sebagai kewajiban kepada negara.

Peningkatan Mutu pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini dilihat dari keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni. Proses pencapaian tujuan dan sasaran tersebut mencakup lingkup organisasi, untuk menyelenggarakan tugas secara efisien dan efektif.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Bakauheni mengatakan bahwa :

Dalam sosialisasi program Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni kami dari pihak Dinas Kecamatan tidak dilibatkan langsung, walaupun ada

laporan kepada saya bahwa ada sosialisasi tentang program tersebut, sehingga pelaksanaannya saya tidak banyak melibatkan diri, namun saya masih tetap memantau pelaksanaan program tersebut, (Wawancara bulan September 2017).

Salah satu fungsi pemerintah adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan. Hal ini menuntut kepekaan dan daya tanggap pejabat publik untuk menangkap dan memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga dituntut untuk melakukan tindakan dalam bentuk suatu kebijakan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bakauheni mengemukakan bahwa :

Pada prinsipnya bahwa Kebijakan pemberian dana BOP, sangat terbantu yang dirasakan oleh Sekolah, karena sekolah dapat berkreasi untuk menata sekolah sesuai usulan program yang dilakukan, namun karena program tersebut terbatas sesuai jumlah siswa pada sekolah tersebut sehingga sekolah yang kurang muridnya juga

sangat terbatas dana yang diterima. (Hasil Wawancara, September 2017).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan yang jelas dalam rangka merespon masalah-masalah publik yang berkembang. Kebijakan publik merupakan bagian integral dalam proses dan sekaligus langkah pelaksanaan roda institusi pemerintahan. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan kebijakan yang diambil akan memberi warna tersendiri kepada institusi bersangkutan.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk sumber daya bahwa dengan adanya kebijakan pengelolaan biaya operasional sekolah (BOP) sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah saat ini, dengan dukungan dana tersedia dalam program kebijakan tersebut, namun karena program tersebut turun dananya ada se sekolah yang sangat terbatas sehingga biaya tersebut tidak mencukupi sekolah untuk berkreasi. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni mengemukakan bahwa:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP), telah berjalan selama beberapa tahun, namun ada beberapa masalah yang selalu timbul, diantaranya yaitu karena pemahaman tentang pengelolaan dana tersebut yang kurang akurat sehingga ada sekolah yang membelanjakan dana tersebut yang kurang sesuai dengan perencanaan kebutuhan. (Hasil Wawancara, September 2017).

Walaupun dampak nyata output kebijakan pengelolaan dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) belum optimal menurut Wahab (2005:107), hal ini merupakan perhatian utama para analis kebijakan dan para administrator, seringkali dampak nyata kebijakan itu sulit untuk diukur secara komprehensif dan sistematis. Lagi pula, hal yang barangkali paling diperhatikan dalam evaluasi program yang dilakukan oleh sistem politik ialah dampak yang dipersepsikan oleh kelompok masyarakat dan lembaga atasan yang berwenang. Persepsi mengenai dampak output kebijaksanaan ini mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam mandat undang-undang.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-

indikator pembentuk disposisi atau sikap pelaksana bahwa dukungan sekolah cukup tinggi terhadap kebijakan Pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni. Namun demikian walaupun guru-guru merasakan adanya penambahan operasional mereka, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni belum bisa mengubah perilaku mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan sehingga pemanfaatan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) relatif belum terlaksana dengan baik sesuai tujuan, Salah satu penyebabnya secara umum adalah tingginya tingkat kebutuhan hidup, hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Supriatna (1997:90), bahwa terdapat relevansi yang positif dan kuat antara gejala kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan di satu sisi, dengan pendidikan formal dan nonformal disisi yang lain.

Sasaran dan tujuannya ialah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kaum petani, pengrajin, nelayan, pertukangan, pengusaha kecil, pedagang dan lain sebagainya, yang tergolong penduduk miskin. Informasi berupa pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, yang menumbuhkan nilai dan

sikap efektif penduduk miskin merupakan dasar bagi aktivitas hidup dan perubahan kehidupan, informasi memiliki makna penting bagi peningkatan aset sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memacu produktivitas kerja, kemandirian, dan perubahan kehidupan sosialnya.

Dari hasil penelitian pada dimensi kualitas sumber daya bahwa pada umumnya sekolah yang menerima Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni, pada umumnya mengatakan bahwa perlu penambahan biaya tersebut karena dana tersebut untuk sekolah-sekolah diluar kota tidak mencukupi untuk operasional sekolah karena muridnya yang kurang. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) seperti yang dikemukakan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bakauheni yaitu:

Pengelolaan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, namun karena keterbatasan murid sehingga tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di sekolah, biaya yang terbesar secara umum disediakan untuk

memberikan insentif kepada guru-guru yang masih mengabdikan sebagai guru honorer karena kekurangan guru pada sekolah-sekolah luar kota. (Hasil Wawancara, September 2017).

Demikian halnya kalau dilihat dari jawaban responden menyangkut dimensi kualitas sumber daya nampaknya pelaksanaan kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni, masih perlu disempurnakan oleh pelaksana kebijakan, karena masih berada pada level cukup, hal ini berarti pemahaman responden terhadap kelompok sasaran belum maksimal atau manfaat dari kebijakan Pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni, belum banyak menunjang kebutuhan operasional sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan dari variabel kualitas sumber daya adalah Cukup dari seluruh pertanyaan pada dimensi variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni, berkaitan dengan indikator-indikator dari pembentuk dimensi kualitas

sumber daya belum dilaksanakan secara optimal.

Agar kebijakan pemberian dana BOP dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggungjawab terhadap sebuah kebijakan, harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Sehingga akan terjadi kebingungan para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dan memberi peluang untuk tidak diimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki.

4. Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOP Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Aspek-aspek yang mempengaruhi Peningkatan Mutu pendidikan implementasi kebijakan pemberian dana BOP di SD Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diuraikan sesuai tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dan mencakup kebutuhan sangat membantu dan menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), adalah Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal, perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pelayanan dan tujuan yang ditetapkan.

Yang perlu diperhatikan oleh Dinas pendidikan di Kecamatan Bakauheni dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi *Stakeholder* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan pendidikan dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta

didik dalam program ini bisa dihindari.

b. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Bakauheni, yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi *Stakeholder* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik program ini bisa dihindari. Dalam melengkapi sarana tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal karena system pendanaan yang belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar saran

dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan atau maintenace merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabot dan perlengkapan itu diterima dari pihak pemborong, penjual atau pembeli sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan, meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana tersebut selama dipergunakan, rutin melaksanakan pemeliharaan setiap tahun.

c. Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan

Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggungjawab pada setiap jenjang pendidikan . Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi pendidikan di Lampung Selatan yang mempunyai wakil bidang sarana dan

prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan saran dan prasarana pendidikan diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah:

1. Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya
2. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama
3. Waktu/jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran
4. Penugasan/penunjukan personil sesuai dengan dengan keahlian pada bidangnya
5. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, antar kegiatan intrakulikuler dengan ekstrakulikuler harus jelas.

Dengan demikian bahwa penggunaan atau pemakaian dari pada sarana pendidikan yang ada, dianggap sudah saatnya untuk rehabilitasi karena ada yang sudah kurang layak untuk dipergunakan dan apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menghambat proses pelaksanaan program pendidikan di Lampung Selatan karena fasilitas kurang layak untuk dipergunakan.

d. Sumber daya manusia.

Pelaksana pendidikan memerlukan kompetensi setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan setiap sarana pendukung tidak mampu menyamai perlengkapan yang diberikan dan ini dapat berakibat pada proses pelaksanaan pendidikan, di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Bakauheni mengatakan bahwa :

Pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan dan dilaksanakan sebagaimana adanya, namun ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan di kecamatan Bakauheni karena sumber daya yang melaksanakan pendidikan sangat terbatas latar belakang yang sesuai dengan pendidikan tersebut. (Wawancara, bulan September 2017).

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk

kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan terbatas, sehingga dalam pertanggung jawaban kebijakan perlu tenaga teknis yang mendampingi.

e. Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pendidikan.

Penyusunan standar sarana dan prasarana diharapkan mampu memberikan motivasi dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Namun penerapan atau implementasinya secara keseluruhan tidak mudah, meskipun standar nasional merupakan kriteria minimum tidak setiap pendidikan mampu memenuhinya. Implementasinya pun dilakukan secara bertahap dan diutamakan kebutuhan yang benar-benar diperlukan dalam proses pembelajaran. Setiap sarana dan prasarana yang disiapkan mewakili kebutuhan utama dari sebuah baik pendidikan Formal maupun pendidikan Non Formal.

Implikasi berkaitan dengan akibat dari implementasi sebuah program atau kegiatan, dalam implementasi standar sarana dan prasarana tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah implikasi dari penerapan tersebut. Bila setiap sarana

dan prasarana yang di adakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar, maka akibat yang mungkin terjadi seperti yang diuraikan diatas adalah munculnya kebijakan lain yang berkaitan dengan pilihan untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan utama dari sebuah pendidikan ataupun satuan pendidikan. Demikian pula dengan perlengkapan setiap ruang selalu di lakukan dengan bertahap dan berkelanjutan. Apabila dilakukan dengan secara langsung yang sesuai dengan ketentuan hambatan yang paling utama adalah pemeliharaan maupun pembiayaan yang tidak mencukupi dan memadai bagi sarana dan prasarana yang disiapkan. Pembangunan sarana dan prasarana pada pendidikan menurut pandangan dari beberapa sumber yang diwawancarai peneliti mengungkapkan bahwa :

Memang kita bangun sarana prasarana itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi seperti ukuran ruangan belajar itu sesuai dengan ukuran standar, ya, 8 x 9m². Jadi saya kira kalau berbicara mengenai sarana prasarana saya pikir untuk ini adalah sekolah yang relatif baik, menurut ukuran kita, iya

kan? Namun fasilitas lain masih dirasa belum mencukupi seperti laboratorium, kalau kegiatan pembelajaran saya kira termasuk lengkap, perpustakaan juga ada namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (wawancara September 2017).

Sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana dan prasarana, dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, tentu harus perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana utama maupun sarana pendukung, sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Sarana utama berupa ruang belajar yang nyaman dan laboratorium yang memadai didukung oleh sarana - sarana pendukung yang lain memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Jika sarana dan prasarana yang tersedia menjadi standar pembelajaran pada pendidikan akan memberikan kontribusi yang menentukan

pula, lahirnya lulusan - lulusan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai agar dapat tetap memberikan kegunaan yang optimal atau memerlukan perawatan yang baik dan kontinyu. Perawatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga - tenaga yang memang kompeten di bidangnya, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah SD di Kecamatan Bakauheni mengemukakan bahwa :

Penghambat sebetulnya tidak terlalu bermasalah, hanya yang jadi penghambat itu adalah ketidak updatetan atau *update* informasi dari tenaga edukasi, tenaga-tenaga kependidikan lainnya itu bagian dari penghambat kecil, tapi kalau itu manajemen mempersiapkannya, dan mempersiapkan sarana komunikasi, jaringan internet itu bagian dari pendukung, tapi kalau tidak, itu bagian dari penghambat” (wawancara September 2017).

Berdasarkan data yang ada yang menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan BOP di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

setiap tahunnya, relatif sama karena jumlah siswa yang ada juga relatif sama dari 3 (tiga) tahun terakhir. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Bakauheni mengemukakan bahwa :

Dari segi prestasi akademik saya tidak terlalu sanksi sebenarnya, walaupun semua fasilitas dan sarana yang ada disini sudah kurang memenuhi standar pendidikan. Hal tersebut perlu pembenahan, menambahkan apa yang rusak, kan begitu. Yang menyangkut persoalan prestasi dari ekstrakurikuler, ini yang perlu didorong terus, apakah itu kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, ini perlu didorong terus supaya dia berkesinambungan. Bukan hanya prestasi akademik tapi dia juga berperstasi dari segi yang lainnya. (wawancara September 2017).

Sehingga kalau ditinjau lebih jauh, perhatian masyarakat terhadap eksistensi pendidikan di Kecamatan Bakauheni masih bersifat “elitis” terbatas pada kalangan tertentu saja. Benar bahwa dalam sejarahnya

pendidikan di Lampung Selatan merupakan lembaga pendidikan yang dibangun dan dikelola atas inisiatif masyarakat, tetapi kepemilikannya masih bersifat eksklusif. Meskipun mengakar kuat, pendidikan di Lampung Selatan masih merefleksikan kerja individual ketimbang kolektif. Hal ini mengakibatkan *sense of ownership* masyarakat terhadap pendidikan rendah.

Kondisi tersebut perlu dijadikan bahan pemikiran oleh pihak *stake holders*, yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan, di Lampung Selatan, untuk mengembangkan suatu sistem perbaikan pendidikan yang berkelanjutan (*continous quality improvement*), karena sampai sekarang. Nampak bahwa perbaikan yang dilakukan itu parsial, tidak ada kesinambungan, dan hanya bersifat tambal sulam.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa teori yang dipergunakan untuk mendukung implementasi kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung selatan yang dikemukakan oleh Edward III (1980:9-10), yang terdiri dari (1) Komunikasi, (2) Disposisi, (3) kualitas sumber

daya manusia, (4) Struktur Birokrasi, kemudian dalam proses implementasi kebijakan bukan saja aspek pengetahuan yang dikembangkan tetapi juga aspek keterampilan dan aspek sikap, sehingga Bantuan operasional pendidikan (BOP) diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan sumber daya manusia, semuanya mendukung dari penelitian tersebut.

5. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemberian dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan namun relatif belum berhasil secara optimal. Penentuan guru yang akan menerima beaguru sepenuhnya menjadi otoritas Kepala Sekola yang dapat secara subyektif kurang memahami kondisi obyektif guru. Pihak sekolah hanya mengandalkan data yang diberikan oleh guru atau masukan antar anggota tim. Dalam penentuan sekolah yang menerima dana BOP,

juga sepenuhnya menjadi otoritas komite Kecamatan yang tidak mendasarkan diri pada kondisi obyektif masing-masing sekolah. Konsekuensinya, sangat dimungkinkan sekolah yang seharusnya lebih layak menerima BOP, justru tidak memperolehnya karena tidak diusulkan oleh komite kecamatan.

2. Aspek-aspek yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dari sisi perencanaan belum direncanakan secara optimal, sehingga dalam penggunaan dana BOP belum memenuhi kebutuhan guru, karena menyangkut keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah menyebabkan terbatasnya jumlah guru yang dapat memperoleh beaguru dan juga terbatasnya jumlah sekolah yang memperoleh dana bantuan operasional. Kemudian sistem pelaporannya tidak dilakukan secara terbuka sehingga guru-guru tidak mengetahui proses pelaporan tersebut, karena tidak adanya aturan dalam mengaja, serta terbatasnya kontrol masyarakat, karena pengelolaan dana BOP menjadi kewenangan

pemerintah provinsi melalui Tim Teknis Kegiatan (TTK) yang ada di Kabupaten yang notabene bukan dari pihak sekolah, sehingga pertanggung jawabanya .

2. Saran-Saran

1. Penerapan kebijakan Pemberian dana BOP tidak dapat mempergunakan sistem target tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian akan bersifat *local spesific*, Untuk itu, sebaiknya program beaguru dan BOP dimasukkan ke dalam program anggaran rutin Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, sehingga berkelanjutan atau dapat diteruskan.
2. Perlunya disosialisasikan ke masyarakat isi program Pemberian dana BOP agar masyarakat dapat mengontrol program tersebut. Untuk itu, agar fungsi dan peran komite sekolah dikembalikan sebagai organisasi yang membantu atau memfasilitasi penetapan dan penyaluran beaguru serta BOP, sedangkan masyarakat berperan memberikan data obyektif dan mengontrol implementasi kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, Philip H. 1987. *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu?* Diterjemahkan oleh Istiwidayanti. Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris. Jakarta.
- Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Sultra. 2008. *Petunjuk teknis Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan.*
- Effendi, Sofian. 2000. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Materi Kuliah MAP-UGM*, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lie, Anita. 2004. *Menuntut Tanggungjawab Negara atas Pendidikan.* KCM Harian Kompas, 5 Agustus 2004.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasrullah. 2004. *Gerakan Percepatan Melek Aksara Langkah Politis Mendongkrak HDI.* Harian Kompas, 29 November 2004. halaman 5.
- Nurkholis. 2002. *Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang.* www.pendidikan-network.org.id.29.10.2004.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pramudji. 1983. *Perbandingan Pemerintahan.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Ratnawati, P. 2003. *Mengukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan.* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.43 tahun ke 9 Juli 2003.
- Soemanto, Wasty. 1992. *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Soenarya, Endang. 2000. *Teori Perencanaan Pendidikan.* Adicita. Yogyakarta.
- Vembriarto. 1985. *Pengantar Perencanaan Pendidikan.* Andi Offset. Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPress, Yogyakarta.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 3 Desember 2017

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

